

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN TAMBANG ILEGAL
DI PONOROGO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Tambang Ilegal
di Ponorogo dalam Perspektif Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu
Bara

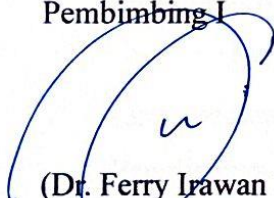
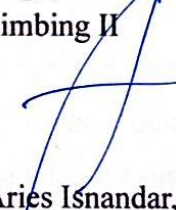
Nama : Arif Megantoro

NIM : 24710616

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I


(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum)
NIDN. 2106048001Ponorogo, 14 September 2020
Pembimbing II
(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H)
NIDN. 0007106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Nama : Arif Megantoro
NIM : 24710616
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah saya dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Tambang Ilegal di Ponorogo dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila ternyata didalam naskah Karya Ilmiah ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiarisme, saya bersedia ijazah saya dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ponorogo, 16 September 2020



Arif Megantoro

NIM. 24710616

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan dukungan penuh dari orang-orang tercinta, pada akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat kami selesaikan tepat waktu, sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, sebagai perwujudan rasa bangga dan bahagia tersebut, dengan ini kami haturkan ucapan syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat limpahan anugerah dan nikmat-Nya yang tiada putus, sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat kami selesaikan tepat waktu, dengan sebagaimana mestinya;
2. Kedua orang tua yang do'a beserta ridho nya yang tidak pernah putus untuk saya dalam menyelesaikan studi ini;
3. Istri tercinta Dianti Alviana yang selalu memotivasi agar segera menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini;
4. Putri kami tercinta Zinnia Megan Chandrika yang tentu waktu bermainnya banyak Ayah sita;
5. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan; dan
7. Kampus kebanggaan, almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

MOTTO

"Keadilan bukan sekadar teks dalam undang-undang, melainkan tindakan nyata di lapangan."

"Hukum tanpa penegakan yang adil ibarat pedang tanpa mata; ia ada, namun tak mampu melindungi."

"Tegakkan hukum walau langit runtuh, lindungi bumi walau rintangan penuh."



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Penyusunan karya tulis ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai dukungan dan kemudahan yang tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan karya tulis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ponorogo, 16 September 2026



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
I. LATAR BELAKANG.....	1
II. RUMUSAN MASALAH	2
III. METODE PENELITIAN.....	2
IV. PEMBAHASAN.....	2
a. Pengaturan dan penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Tambang Ilegal di Kabupaten Ponorogo	2
b. Penegakan Hukum terhadap Tambang Ilegal di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan UU Minerba	3
V. KESIMPULAN	5
VI. Saran	5
DESKRIPSI HKI	7
DAFTAR PUSTAKA	8
SERTIFIKAT HKI.....	9
LAMPIRAN.....	11

ABSTRAK

Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (ilegal), khususnya pada sektor pertambangan non-logam dan batuan (galian C) di Kabupaten Ponorogo, menimbulkan dampak multidimensional pada bidang hukum, lingkungan, serta sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, penerapan, serta penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap keberadaan tambang ilegal di Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan penelaahan bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur kewajiban perizinan (seperti IUP, IUPK, dan SIPB) serta sanksi tegas termasuk ancaman pidana Pasal 158 berupa penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp.100 miliar maupun sanksi administratif implementasi dan penegakan hukum di lapangan belum berjalan optimal. Penegakan hukum masih menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparatur, rendahnya kesadaran hukum, serta tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat setempat terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan kapasitas aparat, edukasi hukum preventif, serta pengembangan pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar tambang.

Kata kunci: Tambang Ilegal, UU Minerba, Penegakan Hukum, Kabupaten Ponorogo, Pertambangan Non-Logam.